



Ferri Wicaksono, SIP MA
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

Problematika Desa Wisata Bahari di Gunungkidul



hanya terbatas pada keindahan alam, tetapi juga berbagai kegiatan yang bisa ditawarkan kepada wisatawan, seperti snorkeling, surfing, dan wisata budaya pesisir. Keunikan budaya lokal memberikan daya tarik tambahan yang memperkaya pengalaman wisatawan. Dengan pengelolaan yang tepat, desa wisata bahari di Gunungkidul bisa menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Selain meningkatkan penghasilan warga melalui pariwisata, desa wisata juga dapat menciptakan peluang usaha baru, seperti homestay, kuliner lokal, serta kerajinan tangan.

Meskipun popularitas wisata bahari di wilayah ini terus meningkat, banyak desa wisata yang masih kesulitan menyediakan akses jalan yang layak, transportasi yang

memadai, serta fasilitas dasar seperti toilet, tempat parkir, dan sumber air bersih. Selain infrastruktur fisik, penting juga untuk menyediakan layanan kesehatan dan keselamatan yang memadai. Selain masalah fasilitas, kerusakan lingkungan juga menjadi tantangan serius. Pengelolaan wisata bahari yang tidak terkontrol menyebabkan peningkatan jumlah sampah di pantai dan laut. Banyak wisatawan yang tidak sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, sehingga sampah plastik dan polusi lainnya menjadi masalah yang merusak ekosistem laut. Pemerintah dan masyarakat lokal perlu bekerja sama dalam menguatkan edukasi lingkungan untuk wisatawan dan pelaku usaha wisata harus digencarkan, dengan fokus pada pengelolaan

sampah dan pelestarian ekosistem laut. Peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata bahari sangat penting, terutama dalam hal perencanaan dan investasi infrastruktur. Pemerintah daerah Gunungkidul harus memiliki komitmen yang lebih kuat untuk mengembangkan desa wisata secara berkelanjutan. Pengalokasian anggaran untuk perbaikan fasilitas, pembangunan sarana dan prasarana wisata, serta dukungan teknis bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah harus berperan sebagai fasilitator dalam membangun kemitraan antara warga lokal dan sektor swasta. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan investor swasta dapat mempercepat pengembangan

desa wisata dengan cara yang lebih efektif dan inklusif. Misalnya, dengan melibatkan pelaku usaha dalam menyediakan infrastruktur pariwisata, pemerintah bisa lebih fokus pada regulasi dan pengawasan lingkungan.

Di sisi lain, kolaborasi aktif warga desa juga sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan desa wisata bahari tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi program. Warga desa bisa berperan sebagai pemandu wisata, pengelola homestay, atau produsen kerajinan dan kuliner lokal, yang semuanya mendukung ekosistem pariwisata yang kuat.

Masyarakat juga perlu didorong untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan cara-cara sederhana, seperti mengelola sampah dengan baik, menjaga kebersihan pantai, dan ikut serta dalam program konservasi alam. Tanpa keterlibatan aktif warga, pengembangan wisata sering kali hanya akan menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat lokal justru terpinggirkan dari manfaat ekonomi yang seharusnya mereka terima.

Pengembangan desa wisata bahari di Gunungkidul memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pesisir. Namun, keberhasilan ini hanya bisa dicapai jika ada sinergi yang kuat antara komitmen pemerintah untuk

menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai, serta kolaborasi warga dalam mengelola dan menjaga kelestarian lingkungan. Tanpa adanya komitmen yang jelas dan kolaborasi yang solid, problematika yang dihadapi oleh desa-desa wisata bahari di Gunungkidul akan terus menghambat pengembangan potensi wisatanya. Dengan dukungan dari semua pihak, Gunungkidul bisa menjadi contoh sukses dari pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan dan inklusif, memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keindahan alam yang telah menjadi kebanggaan daerah ini.

Jayalah

Huruk pikuk kebangsaan mutakhir ini luar biasa heroik. Pembangkangan konstitusi maupun kritik legal yang melawannya semakin intensif terjadi secara diametral dalam urusan berbangsa dan bernegara. Ironisnya: kenapa para aktivis konstitusi itu tidak pernah peduli terhadap pembangkangan konstitusional yang terjadi terhadap UUPA selama berpuluh tahun semenjak 1960, dan semakin mencederai kemerdekaan petani.

Aneka agenda dirumuskan pemerintah kaitannya dengan Reforma Agraria. Tetapi sampai hari ini semua itu bagai Poco-Poco belaka: janji politik yang maju-mundur, memberikan harapan palsu akan kemerdekaan petani dan kemudian dilupakan begitu saja. Selepas pemilu tidak satupun parpol peduli terhadap nasib rakyat tani yang notabene adalah pendukung mayoritas.

Keseluruhan rezim pemerintahan yang ada ternyata setali tiga uang, sama saja, senantiasa menempatkan petani sebagai pelengkap pembangunan, kalau tidak boleh dikatakan tumbal pembangunan. Semuanya menempatkan rakyat tani Indonesia antara lain sebagai produsen pangan murah supaya rakyat miskin bisa makan enak. Juga penyedia bahan baku murah untuk kemudahan industri dan bempin inflasi setiap kali bangsa ini sedang

panik menghadapi potensi inflasi dua digit. Manakala kepanikan itu terjadi, semua petinggi Negara sampai dengan Kepala Negara berpaduan suara: menginstruksikan harga pangan harus dijaga, artinya tidak boleh naik. Meski, semua barang yang lain semakin melangit harganya.

Tumbalisasi yang paling parah adalah: menempatkan rakyat tani sebagai tumbal kelayakan industrialisasi yang sangat menguntungkan pemilik modal. Bagaimana namanya? Setiap tahun pimpinan daerah selalu meninjau ulang besaran UMR-UMK-UMP di kawasan masing-masing. Pada saat yang sama, mereka, para pimpinan itu juga sekuat tenaga mengendalikan harga pangan. Koincidensinya terjadi: bahwa ketika harga pangan terkendali murah, maka UMR-UMK-UMP bisa dengan mudah ditentukan rendah dan nyaris tanpa penolakan pengusaha.

Menjelang pergantian pemerintahan 20 Oktober 2024 ada sedikit harapan.

Karena tampuk pimpinan RI mendatang adalah pimpinan petani, mantan Ketua Umum Himpunan Keluarga Tani Indonesia. Semuanya dan siapapun juga tahu bahwa kemenangannya dalam pilpres karena memperoleh dukungan total rakyat tani Indonesia. Oleh karena itu sangatlah wajar kalau memunculkan sepercik harapan. Kendati tidak bersih dari rasa waswas yang

juga menyertai optimisme dimaksud: akankah ada perubahan mendasar orientasi pemerintahan mendatang menjadi pro-petani dengan segala kebijakan ikutannya? Kegamangan dan optimisme ini sama kuatnya mengingat semua capres dari semua rezim hasil pemilu yang ada selama ini janji untuk petani. Optimisme dan bualan mereka, semuanya sama: hanyalah hingar bingar kampanye. Begitu menang begitu saja melupakan. Sementara itu, tidak pernah ada pembelaan memadai terhadap pengingkaran konstitusional. Ujung-ujungnya tidak lain hanyalah menempatkan rakyat tani yang pemilih mayoritas sebagai tumbal pembangunan. Naifudzu billahi min dzalik: semoga rakyat tani dijauhkan dari kebiadaban ini.

(Penulis, Guru Besar Honorar Agroidustri FTP-UGM)-d

Sambungan hal 1

Pansus

Selanjutnya pada ayat kedua, disebutkan, laporan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban harus dijelaskan kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 hari setelah Ibadah Haji itu berakhir.

"Keterangan itu sudah jelas, bahwa menteri tidak boleh diwakili dan harus hadir sendiri dan menyampaikan laporannya," kata Anggota Pansus Haji DPR Wisnu Wijaya.

Rencananya, kegiatan RDPU ini dihadiri beberapa

berapa kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak maskapai Garuda Indonesia. Namun, dengan padatnya berbagai aktivitas, para petinggi tersebut tidak bisa menghadiri dan hanya diwakili, sehingga agenda rapat ini harus ditunda kembali hingga 27 September mendatang dan berharap para petinggi dari instansi terkait bisa menghadiri kegiatan lanjutan tersebut.

(Ant/Ati)-d

Sambungan hal 1

Korban

Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota kemudian bergerak menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan penggerebekan.

"Pada hari Sabtu sekitar pukul 03.30 WIB, tim datang ke lokasi itu. Jadi, setelah melihat kedatangan Tim Presisi, remaja yang berkumpul tersebutocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga dan ada juga yang mengarah ke Kali Bekasi," ungkapnya.

Remaja yang mengarah ke Kali Bekasi kemudian nekat mencemburkan diri ke aliran sungai tersebut hingga akhirnya ditemukan tewas mengambang pada Minggu (22/9). "Ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan dan gelap sehingga berhasil diamankan oleh Tim Perintis

Presisi," katanya.

Petugas berhasil menggiring 22 orang remaja dalam aksi kejar-kejaran tersebut. Tiga di antara puluhan remaja yang dibawa ke Mapolres Metro Bekasi diketahui memegang senjata tajam.

"Ini dari hasil tindak kepolisian yang telah dilakukan yaitu melakukan olah tempat kejadian perkara, mengevaluasi jenazah ke RS Polri, melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang saksi, melakukan prioritas rekonstruksi dan berkoordinasi dengan Basarnas, BPBD, serta Tim SAR," katanya.

(Ant/Has)-d

Sambungan hal 1

TIM PENGABDIAN AMIKOM ADAKAN PELATIHAN LANJUTAN

Bantu Bank Sampah APEL Jadi Lembaga Modern dan Profesional

YOGYA (KR)-Tim pengabdian dari Universitas Amikom Yogyakarta kembali melaksanakan pelatihan lanjutan untuk pengelola Bank Sampah APEL di Kaktus Coffee Place. Kali ini pelatihan itu berfokus pada strategi promosi digital dan pengelolaan pembukuan yang lebih efisien, Yogyakarta diikuti oleh lima pengelola media sosial serta pembukuan dari Bank Sampah APEL.

"Kami berharap pelatihan ini dapat membantu Bank Sampah APEL bertransformasi menjadi lembaga yang lebih modern dan profesional. Terutama dalam pengelolaan promosi melalui media sosial serta manajemen pembukuan digital. Dengan semakin berkembangnya kemampuan dalam dua aspek ini, kami yakin Bank Sampah APEL akan semakin dikenal luas dan berdampak lebih besar bagi masyarakat," Ketua Pengabdian, Zahrotus Saidah di Yogyakarta, Senin (23/9).

Dalam pelatihan itu menghadirkan pemateri Dwi Nur Rohim mengajak para peserta untuk memahami cara membuat konten visual yang menarik dan efektif



Diskusi terkait kebutuhan mitra.

dalam menarik perhatian audiens media sosial. Seperti teknik memilih template, pemilihan warna yang sesuai, dan tata letak yang estetik agar konten media sosial Bank Sampah APEL

dapat lebih menonjol di tengah persaingan konten yang semakin ketat. "Lewat Canva, peserta berlatih membuat berbagai konten promosi. Seperti poster, unggahan Instagram, dan

flyer digital untuk kegiatan Bank Sampah APEL, semuanya dengan perangkat yang sederhana namun efektif," ungkapnya.

Sedangkan Rafel Alan-

syah Pangestu memberikan pelatihan tentang teknik fotografi menggunakan smartphone. Menurutnya smartphone yang biasa digunakan sehari-hari dapat menjadi alat yang sangat

efektif untuk menghasilkan foto berkualitas tinggi. Tentunya semua itu akan bisa diwujudkan apabila seseorang memahami teknik-teknik dasar fotografi. Seperti pengaturan pencahayaan, pemilihan sudut yang baik, serta komposisi gambar yang menarik. Selain itu peserta diajarkan untuk mengedit foto secara sederhana menggunakan aplikasi bawaan di smartphone, sehingga hasil foto mereka tampak lebih profesional dan siap digunakan untuk promosi media sosial.

"Melalui praktik langsung ini, peserta belajar mengambil foto yang mencerminkan kualitas layanan Bank Sampah APEL dan produk-produk daur ulang yang mereka tawarkan," ujarnya.

Setelah pelatihan, tim pengabdian bersama Herliyanti selaku ketua pengurus Bank Sampah APEL, mengadakan evaluasi untuk meninjau keberhasilan pelatihan ini. Dimana hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan itu berhasil meningkatkan pemahaman para peserta tentang pentingnya digitalisasi. Terutama dalam aspek promosi dan manajemen pembu-

kuan.

"Sebagian besar peserta mengungkapkan kepuasan mereka terhadap materi pelatihan. Serta merasakan adanya peningkatan kemampuan mereka dalam menggunakan media sosial sebagai alat promosi dan mengelola pembukuan digital," imbuh Herliyanti.

Selain pelatihan, tim pengabdian juga menawarkan revitalisasi manajemen dan jejaring Bank Sampah APEL. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah perubahan logo Bank Sampah APEL. Meskipun tetap mempertahankan warna merah dan hijau sebagai identitas, tapi lebih mencerminkan visi dan misi lembaga yang ingin tampil lebih modern dan relevan. Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bank Sampah APEL sebagai lembaga yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga semakin dikenal oleh masyarakat luas.

Kegiatan ini tidak lepas dari dukungan pendanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta dukungan penuh dari Universitas Amikom Yogyakarta. (Ria)



Pelatihan penggunaan canva.



Pelatihan teknik fotografi dasar.